

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Teoritis

2.1.1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Menurut (Bahri, 2016) mengatakan bahwasanya dalam profesi akuntansi memiliki beberapa standar akuntansi yang secara umum telah berlaku dan telah diterapkan secara mendunia. Seluruh standar akuntansi yang telah dikumpulkan itu disebut *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP). Peristiwa peristiwa ekonomi yang telah terjadi dan kemudian dilaporkan akan disusun berdasarkan standar standar tersebut.

Di dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan kemudian ditafsirkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang disusun oleh dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) sendiri, bernaung dibawah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan bukan di bawah Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Dewan penganwas yang memiliki tugas sebagai pemilih anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), Dewan Standar Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan (DKSAK), dan menetapkan mekanisme kerja, yaitu pengurus pusat IAI. Dewan standar konsultatif akuntansi keuangan memiliki tugas yaitu memberikan arahan dan masukan kepada DSAK. Standar akuntansi keuangan sendiri disusun bertujuan untuk :

1. Meminimalkan atau memperkecil kesalahan dari penyusun sebab laporan keuangan memiliki pedoman yang baku.
2. Memudahkan auditor dalam mengaudit laporan keuangan.
3. Agar laporan keuangan dapat seragam sehingga dapat dibandingkan, relevan dan reliabel.
4. Mempermudah pembaca laporan keuangan dalam mentafsirkannya dan mempermudah pembaca dalam membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda.

2.1.2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2009, yang penerapan efektifnya di mulai sejak tanggal 1 Januari 2011.(Bahri, 2016). Mengatakan bahwa entitas tanpa akuntabilitas publik adalah sebagai berikut :

1. Tidak memiliki akuntabilitas yang signifikan

Maksudnya adalah standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik tidak berlaku untuk entitas yang terdaftar di bursa efek atau sedang mendaftar di bursa efek untuk tujuan penerbitan saham di BEI, atau entitas ini disebut sebagai *go public*. Sebab mereka sudah memiliki standar yang berlaku yaitu standar akuntansi keuangan umum (SAK UMUM), sedangkan standar akuntansi etap hanya berlaku untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik.

2. Tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*).

Standar akuntansi keuangan (SAK) dibuat sederhana untuk mempermudah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik untuk membuat laporan keuangannya dengan profesional. Sehingga tidak cocok digunakan oleh entitas yang sudah *go public* atau yang telah menerbitkan laporan keuangannya untuk tujuan memberikan informasi kepada pihak eksternal (investor, kreditor, maupun kreditor). Karena, standar akuntansi ETAP terlalu sederhana, sehingga mereka diharuskan menggunakan standar akuntansi umum (SAK UMUM).

2.1.3. Karakteristik SAK ETAP

Karakteristik Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah ciri khas dari standar tersebut yang berguna bagi pemakainya khususnya UMKM. (Norkamsiah, Agus, & Agus, 2016) mengatakan bahwasanya ada empat ciri khas dari laporan keuangan yang berstandar SAK ETAP, yaitu :

1. Dapat dipahami

Laporan keuangan harusnya disusun sedemikian rupa agar mudah dipahami oleh pembaca laporan keuangan, dengan susunan berstandar SAK ETAP menjadikan sebuah laporan keuangan lebih profesional dan rapi sehingga seharusnya laporan yang sudah disusun dengan SAK ETAP mudah untuk dipahami dan tidak berbelit belit. Biasanya, laporan keuangan bestandar SAK ETAP memiliki lima tahapan dan kelima limanya adalah bermanfaat dalam

memberikan informasi mengenai keadaan entitas sebagaimana laporan keuangan menjadi pedoman dalam mengambil keputusan

2. Relevan

Laporan keuangan yang baik harusnya mampu untuk dijadikan sebagai bahan dalam mengambil keputusan, dan dapat dijadikan prediksi dimasa depan melalui catatan dimasa lalu.

3. Keandalan

Seharusnya laporan keuangan haruslah dapat dipercaya itulah sebabnya laporan keuangan harus disusun dengan standar yang berlaku umum, agar tidak terjadi kesalahan yang material, maupun kesalahan pemahaman didalamnya.

4. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan harusnya dapat dibandingkan agar dapat menilai kinerja dari entitas ekonomi.

2.1.4. Tujuan Penerapan SAK ETAP Pada Laporan Keuangan

Menurut (Purba, 2019) disebutkan bahwasanya didalam PSAK No.1 laporan keuangan bertujuan agar dapat diperbandingkan dengan laporan laporan keuangan sebelumnya maupun dengan laporan keuangan dengan usaha yang sama. Dan berikut merupakan beberapa alasan mengapa UMKM harus menerbitkan laporan keuangan bagi usahanya:

1. Memberikan informasi mengenai bagaimana kinerja dari manajemen perusahaan dalam satu periode tertentu.

2. Di dalam laporan keuangan memberikan informasi mengenai jumlah hutang dan modal suatu perusahaan. Dalam informasi tersebut kita dapat melihat seberapa baik perusahaan dalam mengelola modal untuk usahanya dan dapat melihat seberapa lancar perusahaan membayarkan hutangnya.
3. Memberikan informasi mengenai jumlah pendapatan yang diperoleh perusahaan dan jenis dari pendapatannya dalam periode tertentu.
4. Laporan keuangan juga dapat memberikan informasi lain mengenai perusahaan yang dianggap perlu.
5. Di dalam laporan keuangan memberikan informasi mengenai harta yang dimiliki perusahaan.
6. Menampilkan catatan atas laporan keuangan yang dimiliki perusahaan.
7. Memberikan informasi mengenai perubahan pada aktiva, pasiva maupun modal yang dimiliki perusahaan.

Beberapa poin di atas, memberikan pengertian bahwa pengambil keputusan seperti pemerintah, investor dan kreditor membutuhkan informasi mengenai keadaan perusahaan yang dimana dapat dilihat melalui laporan keuangan yang dimiliki perusahaan tersebut.

Laporan keuangan haruslah disajikan secara lengkap oleh manajemen perusahaan, agar informasi tersebut dapat berguna bagi pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan ekonominya.

Dalam penerapannya SAK ETAP juga bertujuan mempermudah bagi UMKM dalam menyusun laporan keuangan agar dapat mempermudah UMKM

mendapatkan akses dalam memperoleh dana dari para pemberi peminjaman modal seperti perbankan. SAK ETAP sendiri merupakan standar yang berdiri sendiri tidak mengacu pada standar akuntansi keuangan umum (Hetika & Mahmudah, 2017).

2.1.5. Manfaat SAK ETAP Bagi UMKM

Dalam penerapannya standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik memiliki beberapa manfaat. Menurut (Widyastuti, 2017) mengatakan ada tiga poin manfaat yang dirasakan UMKM dalam mengimplementasikan SAK ETAP yaitu sebagai berikut :

1. SAK ETAP dalam penerapannya lebih mudah dan lebih sederhana dibandingkan PSAK IFRS (SAK UMUM), sehingga para UMKM pun mampu menyusun laporan keuangannya secara handal.
2. Meskipun SAK ETAP lebih sederhana namun dapat memberikan informasi keuangan yang handal dalam laporan keuangan suatu perusahaan.
3. Kabar baiknya UMKM dapat menyusun laporan keuangannya sendiri serta dapat diaudit dan mendapatkan opini audit yang nantinya akan mempermudah UMKM dalam meminjam dana dari badan penyalur dana seperti perbankan.

2.1.6. Laporan Keuangan SAK ETAP

Seperti yang telah diketahui, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Publik

(SAK ETAP) pada tanggal 17 Juli 2009. Yang ditujukan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan dan tidak menyediakan pelaporan keuangan untuk pihak eksternal. Maka laporan keuangan SAK ETAP di sederhanakan dan terdiri dari (Novia & Sulastiningsih, 2018).

1. Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang di dalamnya menyajikan aset, kewajiban, dan kewajiban suatu entitas pada suatu tanggal tertentu sampai akhir periode pelaporan. Di dalam neraca paling tidak UMKM harus mencantumkan beberapa pos, pos pertama yaitu aktiva tetap yang isinya berupa aset lancar, aset tetap dan aset tak berwujud.

Aset lancar berupa : kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, properti investasi. Sedangkan aset tetap dapat berupa : peralatan, mesin, gedung, kendaraan, gedung, dan tanah. Kemudian aset tak berwujud dapat berupa *good will*. Maka di dapatlah total aktiva UMKM.

Pos kedua yaitu pasiva yang isinya terdapat hutang usaha yang terdiri dari hutang lancar dan hutang jangka panjang. Maka didapatlah total hutang dari UMKM tersebut. Pos ketiga yaitu ekuitas yang didalam nya terdiri dari modal usaha, tamnahan modal dan laba ditahan. Maka di dapatlah totap pasiva.

2. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi merupaka kelompok dari pos pos penghasilan dan beban beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain.

Dalam mencantumkan laporan laba rugi paling sedikit UMKM harus mencantumkan pos pos berikut :

- a. Pendapatan usaha yang di dalamnya terdapat pendapatan usaha dan pendapatan operasi lain maka di dapatlah total pendapatan.
 - b. beban usaha biasanya isinya adalah beban pokok penjualan, beban pegawai, beban pemasaran, beban operas lain, beban penyusutan dan amortisai maka didapatlah total beban.
 - c. bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas
 - d. beban pajak, dan laba rugi neto.
3. Laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi dan saldo laba.
- a. Laporan perubahan ekuitas.
Didalam laporan perubahan ekuitas menyajikan laba rugi entitas untuk periode tertentu, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut.
 - b. Laporan laba rugi saldo laba.
Di dalam laporan laba rugi saldo laba menyajikan laba rugi entitas dan perubahan saldo laba untuk suatu periode pelaporan.
4. Laporan arus kas.
- Enittas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengelompokannya menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
5. Catatan atas laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi mengenai pos pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam pelaporan keuangan.

Untuk menyusun laporan keuangan berstandar SAK ETAP maka dapat dimulai dari :

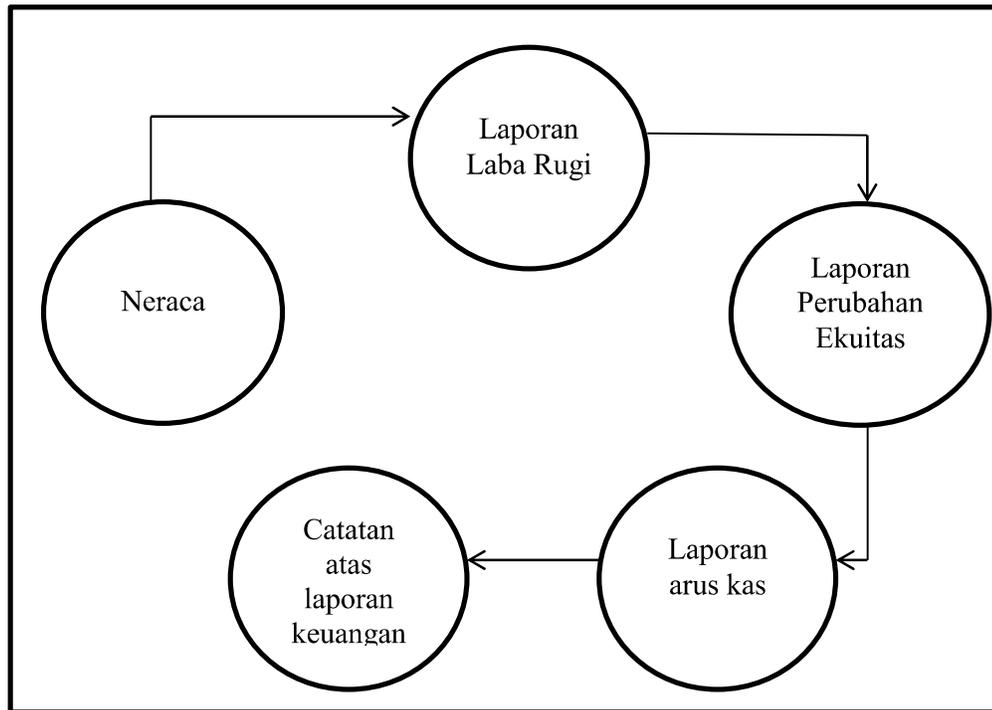
1. Mengidentifikasi bukti transaksi penerimaan kas.
2. Mengidentifikasi bukti transaksi pengeluaran kas.
3. Mencatat (menjurnal) transaksi ke dalam buku jurnal.
4. Memposting jurnal ke buku besar.
5. Menyusun neraca saldo.
6. Menyusun jurnal penyesuaian.
7. Menyusun neraca lajur.
8. Menyusun laporan keuangan.
9. Menyusun jurnal penutup.
10. Menyusun neraca saldo setelah penutupan.
11. Menyusun jurnal pembalik.

2.1.7. Siklus Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP

Dalam penerapannya ada beberapa siklus dalam membuat laporan keuangan yang Berstandar Akuntansi Keuangan untuk Entitas tanpa Akuntabilita Publik (SAK ETAP).

Siklus sendiri merupakan tahapan tahapan bagaimana sebuah laporan keuangan di susun. Untuk mempermudah memhami siklusnya. Berikut

merupakan gambar siklus laporan keuangan menurut SAK ETAP (standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntailitas publik :



Gambar 2.1 Siklus Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP

Sumber : gambar diolah penulis (2019)

2.1.8. Defnisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Di dalam UU No 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengartikan bagan bagan UMKM adalah sebagai berikut :

1. Usaha mikro.

Usaha mikro adalah usaha yang dimiliki oleh orang perorangan dan/atau badan usaha yang perorangan yang memenuhi persyaratan sebagai usaha mikro sebagai mana yang telah diatur dalam undang undang.

2. Usaha kecil

Usaha kecil adalah usaha yang berdiri sendiri serta produktif dan badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan maupun cabang dari perusahaan dilakukan oleh perorangan, tidak dikuasai maupun dimiliki ataupun menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang telah diatur di dalam undang undang.

3. Usaha menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung maupun dengan usaha kecil atau usaha besar sebagai mana yang telah diatur didalam undang undang.

2.1.9. Karakteristik UMKM

Berdasarkan undang undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di indonesia, usaha di kelompokkan menjadi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.(Rusastra, 2019). Dan dibawah ini merupakan karakteristik UMKM :

1. Usaha mikro.

Usaha mikro adalah usaha milik perseorangan atau badan usaha yang memiliki jumlah kekayaan bersih kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dan hasil penjualan tahunannya berkisar kurang dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha kecil.

Usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Paling banyak sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan hasil penjualan tahunannya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak mencapai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus rupiah).

3. Usaha menengah.

Usaha menengah memiliki kekayaan bersih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hingga paling banyak yaitu Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus rupiah) dan paling banyak hingga Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Untuk mempermudah dalam memahami karakteristik UMKM anda dapat melihat tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Kriteria Berdasarkan Kekayaan dan Hasil Pertahun

Jenis UMKM	Kriteria	
	Kekayaan bersih	Hasil penjualan tahunan
Usaha mikro	< Rp 50 juta	< Rp 300 juta
Usaha kecil	Rp 50 juta – Rp 500 juta	Rp 300 juta – 2,5 milyar
Usaha menengah	Rp 500 juta – Rp 10 milyar	Rp 2,5 milyar – Rp 50 milyar

Sumber : Berdasarkan UU No 20 Tahun 2008 mengenai pengelompokan UMKM

2.2. Penelitian Terdahulu.

Di bawah ini merupakan hasil dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai penerapan SAK ETAP pada UMKM yang menjadi acuan penelitian penulis.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hetika & Mahmudah, 2017) berjudul Penerapan Akuntansi Dan Kesesuaiannya Dengan SAK ETAP Pada UMKM Kota Tegal UMKM. Bahwasanya mereka masih menggunakan laporan keuangan yang sederhana bahkan beberapa darinya tidak mengumpulkan bukti transaksi dari usahannya. Dan UMKM belum menerapkan SAK ETAP padahal SAK ETAP banyak memberikan dampak positif terhadap UMKM.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Arisanty & Syarthini, 2018) berjudul Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kota Makasar bahwasanya UMKM belum memahami mengenai SAK ETAP dan penerapannya terhadap usaha mereka. UMKM tersebut mengaku tidak memiliki tenaga profesional yang dapat menyusun laporan keuangannya yang dapat mewakili si pemilik dalam melakukan pencatatan dan pembukuan, hal ini disebabkan UMKM belum berani mempekerjakan tenaga profesional. Pemahaman UMKM terhadap SAK ETAP masih rendah, UMKM menganggap pencatatan atas laporan keuangannya hanya sebatas laporan bisnis, UMKM menganggap pencatatan yang dilakukan sudah jelas dan efektif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fadlol et al., 2018) dengan judul Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Standar akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada *Oryza Mart* Jember Periode 2017 yang merupakan salah satu UMKM di kota Jember bahwasanya *Oryza Mart* telah menerapkan SAK ETAP pada laporan keuangannya. Meskipun masih ada beberapa kendala yang dialaminya dalam pengakuan akun dan pengelompokan akun.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Frilisia & Wirajaya, 2018) dengan judul Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada PT.Aira Nusantara Indah yang juga merupakan pelaku UMKM dari analisi yang mereka kerjakan bahwasanya PT. Aira Nusantara Indah sudah melakukan proses pencatatan dengan menggunakan jurnal khusus, pengakuan dan pengelompokan akun sudah sesuai dengan SAK ETAP. Namun, PT. Aira Nusantara Indah tidak melakukan pencatatan mengenai laporan keuangan sehingga tidak sesuai dengan SAK ETAP, dan PT. Aira Nusantara Indah mengalami kendala dalam menyusun laporan keuangannya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Norkamsiah et al., 2016) dengan judul Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Penyusunan Laporan Keuangan mengatakan bahwasanya penelitian yang dilakukan kepada CV Aba Computer yang merupakan salah satu UMKM dapat disimpulkan CV Aba Computer belum menerapkan SAK ETAP.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Widyastuti, 2017) dengan judul Pencatatan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bidang Jasa dalam hasil penelitiannya ia berkata bahwasanya Dis Co belum menerapkan standar akuntansi keuangan etap pencatatan yang dilakukannya masih di catat dengan manual yaitu berupa buku besar yang berisi catatan mengenai uang dari jasa bimbingan belajar siswa, catatan pengeluaran dan beban serta biaya biaya lainnya. Kemudian dalam penelitiannya beliau menemukan fakta bahwa penyebab kendala dari tidak menerapkan SAK ETAP yaitu kendala internal yang berupa kurangnya pemahaman pemilik mengenai SAK ETAP, pemilik tidak mengetahui mengenai manfaat dan tujuan dari SAK ETAP, dan informasi mengenai laporan keuangan hanya di gunakan si pemilik sebagai informasi pribadi. Sedangkan faktor eksternal berupa minimnya sosialisasi dan pembinaan dari pemerintah mengenai manfaat dan tujuan dari SAK ETAP.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dini, Wita, & Afvan, 2017) yang berjudul Pelatihan Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yang Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dalam penelitian mereka pemerintah telah memberikan pelatihan kepada UMKM mengenai SAK ETAP. Lazimnya UMKM muara jalai tidak pernah menggunakan standar akuntansi sebab mereka hanya menggunakan pencatatan tradisional pelatihan yang diberikan yaitu menyusun pembukuan tahap awal yaitu pencatatan

transaksi, posting buku besar, dan laporan keuangan. Memahami penyusunan dan penyajian laporan keuangan akan meningkatkan Omzet Mitra di bidang Ekonomi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Novia & Sulastiningsih, 2018) dengan judul Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada UMKM di dalamnya berisi bahwa sosialisasi mengenai SAK ETAP berpengaruh positif terhadap UMKM, Omzet yang di peroleh UMKM tidak memiliki pengaruh terhadap penerapan SAK ETAP pada usaha UMKM di karenakan UMKM terlalu sibuk dengan usahanya sehingga tidak menerapkan SAK ETAP, tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap pengimplementasian SAK ETAP pada UMKM dalam kasus ini di karenakan motivasi dan persepsi yang dimiliki UMKM mengenai SAK ETAP, teknologi berpengaruh positif terhadap penerapan SAK ETAP pada UMKM.

Hasil penelitian jurnal internasional yang berjudul *Society Assistance Financial Report Bases On Financial Accounting Standar Report Of Entitis without public accountability Standard In Encouraging Small and Middle Enterprises Development* oleh (Murti, 2016) dengan hasil bahwa entitas belum menerapkan laporan keuangan bestandar SAK ETAP. Mereka hanya mencatat catatan arus kas masuk dan catatan seringkali tidak di catat total transaksi.

Hasil penelitian jurnal internasional yang dilakuan oleh (Hendrian & Hadiwidjaja, 2016) dengan judul *Implementation of Accounting Standard on Small and Medium Sized Entities (SMEs)* . menyatakan bahwa UMKM belum

menerapkan SAK ETAP karena kurangnya sosialisasi mengenai SAK ETAP yang mengakibatkan kurang tahunya mereka terhadap standar tersebut.

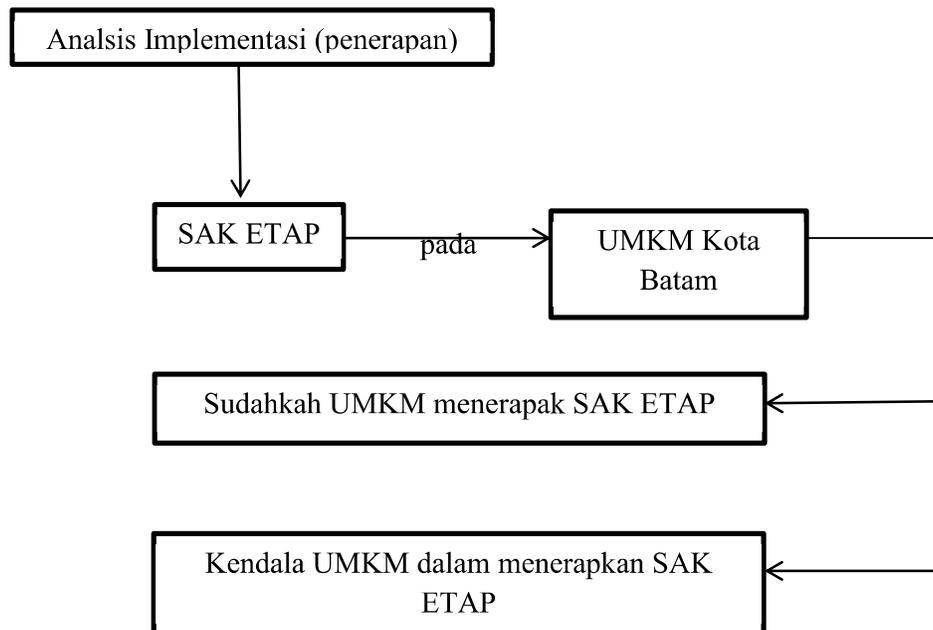
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Hasil Penelitian
1	Hetika dan Nurul Mahmudah (2017)	Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya dengan SAK ETAP pada UMKM Kota Tegal	UMKM belum menerapkan SAK ETAP pada laporan keuangannya
2	Linda Arisanty Razak dan Syarthini Indrayani (2018)	Analisi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Makasar	UMKM belum memahami mengenai SAK ETAP sehingga tidak menerapkannya di dalam laporan keuangannya
3	M. Ainun Fadlol, Titin Kartitini dan Sri Katun (2018)	Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Oryza <i>mart</i> Periode 2017	UMKM telah berusaha dan sudah menerapkan SAK ETAP walaupun masih ada beberapa kendala dalam pengakuan dan pengelompokan akun
4	Friska Frisilia dan I Gde Wijaya (2018)	Penerapan Strandar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada PT. Aira Nusantara Indah	PT. Aira Nusantara Indah telah menerapkan SAK ETAP
5	Norkamsiah, Agus Iwan Kesuma dan Agus Setiawaty (2016)	Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan	CV Aba Computer belum menerapkan SAK ETAP pada laporan

			keuanganya
6	Pristiana Widyastuti (2017)	Pencatatan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Bidang Jasa	Dis Co belum menrapkan standar akuntansi keungan ETAP pada laporan keuanganya ia hanya menggunakan buku besar sebagai catatan keungan
7	Dini Onasis, Wita dwika Listiahana dan Afvan Aquino (2017)	Pelatihan Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Yang Bersis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Di Desa Muara Jalai	UMKM belum menerapka SAK ETAP pada laporan keuanganya
8	Novia Nurdwijayanti dan Sulistianingsih (2018)	Analisis Faktor Faktot Yang Memepengaruhi Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada UMKM	Penerapan stadar akuntansi keunga ETAP pada laporan keuangan berpengaruh positif terhadap UMKM
9	Galuh Tresna Mukti (2016)	<i>Society Assistance Financial Report Based On Financial Accounting Standard Of Entitis Without Publik Accountability Standard In Encouraging Small And Middle enterprises Development</i>	Entitas hanya mencatat arus kas masuk dan catatan seringkali tidak dicatat total transaksi
10	Hendrian dan Dwiyani Hadiwidjaja (2016)	Implementation of Accounting Standard on Small and Medium Sized Entities (SMEs)	UMKM belum menerapkan SAK ETAP karena kurangnya sosialisasi.

2.3. Kerangka Pemikiran

Dalam rangka mempermudah pembaca memahami mengenai penelitian Analisis Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada UMKM Kota bastam Batam. Dapat dijelaskan dalam kerangka pemikiran pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Sumber : peneliti (2019)